



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

KECAMATAN TAMAN SARI

Jalan Usman Ambon Kelurahan Kejaksaan Kota Pangkalpinang
Telp. (0717) 435494

KEPUTUSAN CAMAT TAMAN SARI
NOMOR : 188.4/ 09 /KEP/KEC.TS/II/2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN

ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

PADA KANTOR KECAMATAN TAMAN SARI KOTA PANGKALPINANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat, maka dipandang perlu adanya pengaturan tentang standar pelayanan dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Taman Sari tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada Kantor Kecamatan Taman Sari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pemekaran Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 02);

17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
18. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;
19. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
20. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Visi, Misi dan Motto Serta Uraian Tugas Pejabat Penyelenggara dan Petugas Pelaksana Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Pangkalpinang;
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 Nomor 62);
22. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 Nomor 312).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada Kantor Kecamatan Taman Sari;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada Kantor Kecamatan Taman Sari yang ditetapkan terdiri dari :

1. Surat keterangan kurang / tidak mampu (SKTM);
2. Rekomendasi kelurahan kategori rawan bencana untuk membentuk Kampung Siaga Bencana (KSB);
3. Surat pengantar pendaftaran penduduk untuk pembuatan NIK awal;
4. Surat pengantar pendaftaran penduduk Non Permanen;
5. Surat keterangan kematian bagi penduduk yang meninggal di rumah;
6. Surat keterangan domisili sekretariat partai politik dan ormas.

- KETIGA : SOP berfungsi :
1. Sebagai mekanisme penggerak organisasi/lembaga agar dapat berjalan/berfungsi secara efektif dan efisien;
 2. Untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan yang akan mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan;
 3. Sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan lebih lanjut dikemudian hari.
- KEEMPAT : Uraian dan alur SOP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
pada tanggal : 02 Januari 2026

 **Pt. CAMAT TAMAN SARI**
KOTA PANGKALPINANG,

RANDI APRIANTO, S.STP.,M.AP
NIP. 198604202006021001

ALUR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) TAMAN SARI KOTA PANGKALPINANG

No.	Uraian Kegiatan	Alur Pelayanan					Waktu	Ket.
		Pemohon	Petugas Loket	Kepala Seksi	Sekretaris Camat	Camat		
1.	Pemohon mengambil nomor antrian dari mesin antrian otomatis yang tersedia di ruang PATEN	Mengambil Nomor Antrian dan menunggu di ruang tunggu	Berkas Tidak Lengkap				Proses dilaksanakan dalam waktu 20 Menit, kecuali yang memerlukan verifikasi lapangan maksimum 1 (satu) hari kerja	Dalam hal CAMAT tidak berada ditempat atau sedang ada tugas yang tidak dapat diunggulkan untuk mendampingi Surat Rekomendasi/Keterangan lainnya dapat diserahkan kepada SEKCAM selanjutnya kepada KASI demi efektifitas waktu tanpa mengurangi Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat (diatur dalam Lampiran 1 SOP)
2.	Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke petugas loket 1 atau petugas loket 2 setelah nomor antri dipanggil	Pengajuan Berkas	Pemeriksaan Berkas					
3.	Petugas Loket : - Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan - Berkas TIDAK LENGKAP dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi - Berkas LENGKAP diproses selanjutnya berkas diserahkan ke Kepala Seksi untuk diverifikasi - Menginformasikan kepada Pemohon untuk menunggu di ruang tunggu yang tersedia atau menginformasikan kepada pemohon jadwal survey/verifikasi lapangan (bila diperlukan)		Berkas Lengkap Langkah diserahkan kepada Kepala Seksi terkait untuk diverifikasi					
4.	Kepala Seksi : - Memeriksa pengoreksi dan memaraf surat rekomendasi/rtr/jalannya - Melakukan Verifikasi Lapangan bila diperlukan - Menyerahkan ke SEKCAM			Verifikasi Lapangan Pengoreksi dan Memaraf Berkas Pemohon				
5.	SEKCAM - Mengoreksi dan memaraf surat rekomendasi/rtr/jalannya - Menyerahkan ke CAMAT				Koordinasi dan Paraf			
6.	CAMAT menandatangani surat rekomendasi/rtr/jalannya					Penerbitan/ Penandatanganan surat		
7.	- Petugas loket 2 atau 3 menerima pelayanan registrasi/menerima nomor dan mencetak pada buku registrasi Kecamatan selanjutnya menyerahkan pada petugas loket 1 - Petugas loket 1 menerima pelayanan memafkopi berkas untuk diserahkan, memberi stempel pada berkas Asli Pemohon dan selanjutnya menyerahkan berkas pada pemohon - Petugas loket 1 menerima pelayanan menginformasikan kepada Pemohon agar dapat mengisi questioner tingkat kepuasan pelayanan melalui mesin KEM yang tersedia di ruang pelayanan	Pengambilan berkas pelayanan dari pemohon pada mesin KEM yang tersedia	- Penomoran/ Registrasi Asap Rekomendasi Berkas pada pemohon					

